

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024**

Balai Pelatihan Pertanian Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. Raden Gunawan Hajimena
Kotak Pos 8 Unila Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lampung Selatan, Januari 2025

Kapala Balai,



Dr. P. Adi Destriadi Sutisna, SP.,MP
NIR 198112252009011010

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Lampiran	38



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
JL. RADEN GUNAWAN, DESA HAJIMENA, KEC. NATAR, KAB. LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG
TELP/FAX. (0721) 703570, WEBSITE : <https://bpplampung.bpsdmp.pertanian.go.id/>



ASN BAPELTAN LAMPUNG BPPSDMP KEMENTERIAN PERTANIAN TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lampung Selatan, Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. P. Adi Desnadi Sutisna, SP.,MP
NIP. 198112252009011010

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp160.991.100,00 atau mencapai 111 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp145.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp9.620.654.492,00 atau mencapai 99 % dari alokasi anggaran sebesar Rp9.691.228.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp149.929.200.514,00; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.332.400,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp149.904.868.214,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp15.795.177,00 dan Rp.149.913.405.337,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp160.991.600,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.10.767.109.204,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp. -10.606.117.604,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp. 0,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-10.606.117.604,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 151.059.860.049,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -10.606.117.604,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.9.459.662.892,00 dan dikurangi kenaikan/penurunan entitas

Rp. -1.146.454.712,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.149.913.405.337,00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

U R A I A N	ANGGARAN REVISI	REALISASI	% Realisasi terhadap Anggaran	REALISASI
	2024	2024		2023
PENDAPATAN	145.000.000	160.991.600	111	232.107.129
Penerimaan Pajak	-	-		-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	145.000.000	160.991.600	111	232.107.129
BELANJA	9.691.228.000	9.620.654.492	99	7.877.402.862
Belanja Pegawai	4.295.700.000	4.257.362.825	99	3.009.055.092
Belanja Barang	5.299.128.000	5.267.823.667	99	4.868.347.770
Belanja Modal	96.400.000	95.468.000	99	-

II. NERACA

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
NERACA
PER 31 Desember 2024 dan 31 DESEMBER 2023

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)		
U R A I A N	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR	24.332.300	22.155.000
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Persediaan	24.332.300	22.155.000
ASET TETAP	149.904.868.214	151.072.916.594
Tanah	128.655.031.000	128.655.031.000
Peralatan dan Mesin	12.030.448.721	11.961.765.721
Gedung dan Bangunan	24.963.966.000	24.963.966.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.356.416.000	1.356.416.000
Aset Tetap Lainnya	74.700.000	74.700.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.175.693.507)	(15.938.962.127)
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	-	-
ASET LAINNYA	-	-
Aset Lain-lain	284.199.450	259.614.450
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(284.199.450)	(259.614.450)
JUMLAH ASET	149.929.200.514	151.095.071.594
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.795.177	35.211.545
Utang kepada Pihak Ketiga	15.795.177	35.211.545
Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
Uang Muka dari KPPN	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
EKUITAS		
Ekuitas	149.913.405.337	151.059.860.049
JUMLAH EKUITAS	149.913.405.337	151.059.860.049
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	149.929.200.514	151.095.071.594

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

U R A I A N	2024	2023
Pendapatan Operasional	160.991.600	314.355.623
Pendapatan Perpajakan	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	160.991.600,00	314.355.623,00
Beban Operasional	10.767.109.204	11.347.199.644
Beban Pegawai	4.241.053.825,00	3.836.858.942,00
Beban Persediaan	228.534.200,00	245.450.000,00
Beban Barang dan Jasa	2.781.606.689,00	3.026.801.937,00
Beban Pemeliharaan	669.720.997,00	665.676.291,00
Beban Perjalanan Dinas	1.442.677.113,00	1.896.900.564,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	140.000.000,00	330.000.000,00
Beban Bantuan Sosial	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.263.516.380,00	1.345.511.910,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Rincian Khusus Beban dalam rangka penanganan covid-19	-	-
Jumlah Beban	10.767.109.204	11.347.199.644
Kegiatan Non Operasional	(10.606.117.604)	(11.032.844.021)
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0,00	42.600.000,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	557.500,00	2.590.429,00
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	557.500	45.190.429
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(10.606.117.604)	(10.987.653.592)
Pos Luar Biasa	-	-
Beban Luar Biasa	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-
Surplus/Defisit LO	(10.606.117.604)	(10.987.653.592)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

U R A I A N	2024	2023
EKUITAS AWAL	151.059.860.049	152.268.402.239
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10.606.117.604)	(10.987.653.592)
MENDASAR	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Selisih Revaluasi Aset	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	-	-
Koreksi Lain-Lain	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	9.459.662.892	9.779.111.402
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(1.146.454.712)	(1.208.542.190)
EKUITAS AKHIR	149.913.405.337	151.059.860.049

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelatihan Pertanian Lampung

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung merupakan unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di wilayah dengan kedudukan, tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor : 109/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Didalamnya disebutkan bahwa BPP Lampung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. BPP Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

BPP Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian
- o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis

- q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BPP Lampung.

Visi BPP Lampung adalah ” *Terwujudnya Lembaga Diklat yang unggul dan terdepan untuk Menghasilkan SDM yang profesional dalam Mendukung Pembangunan Pertanian – Bio Industri Berkelanjutan* ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, BPP mempunyai Misi-Misi yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan;
2. Meningkatkan kualitas program kediklatan berbasis kinerja;
3. Memberikan pelayanan prima kepada aparatur maupun non aparatur subsektor tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah;
4. Mengembangkan program pelatihan inovatif bagi aparatur dan non aparatur berbasis Bio Energi dan Bio Industri berkelanjutan;
5. Meningkatkan Pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta Produktivitas Instalasi Agribisnis;
6. Memberikan konsultasi Agribisnis Jamur Tiram dan Ubi Kayu;
7. Meningkatkan kerjasama penyelenggaraan diklat dalam negeri dan luar negeri;
8. Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pelatihan dan melakukan pengendalian intern yang akurat dan kredibel;
9. Meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan tani sebagai lembaga ekonomi produktif dan berdaya saing;
10. Meningkatkan kualitas penatausahaan balai yang transparan dan akuntabel.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul

Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan Pertanian Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pelatihan Pertanian Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.991.600,00	145.000.000,00
Jumlah Pendapatan	160.991.600,00	145.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	4.257.362.825	4.295.700.000,00
Belanja Barang	5.267.823.667	5.299.128.000,00
Belanja Modal	95.468.000	96.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	9.620.654.492,00	9.691.228.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp160.991.600,00 atau mencapai 111% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 145.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	145.000.000,00	160.991.600,00	111
Jumlah	145.000.000,00	160.991.600,00	111

Realisasi pendapatan TA 2024 sebesar 69 % jika dibandingkan pendapatan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.991.600,00	232.107.129,00	69
Jumlah	160.991.600,00	232.107.129,00	69

Sedangkan rincian PNBPN perbandingan semester II TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	26.862.500	1.800.000	1.492
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.360.100	31.231.700	43
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	113.590.000	45.885.000	248
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	847.000		-
Pendapatan Sewa dan Peralatan Mesin	5.832.000		-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.590.429	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	500.000	108.000.000	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		42.600.000	-
Jumlah	160.991.600	232.107.129	69

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp.9.620.654.492,00 dari anggaran belanja sebesar Rp. 9.691.228.000,00 atau sekitar 99% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	4.295.700.000	4.257.362.825	99
Belanja Barang	5.299.128.000	5.267.823.667	99
Belanja Modal	96.400.000	95.468.000	99
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0
Jumlah	9.691.228.000	9.620.654.492	99

Dibandingkan dengan TA 2023, realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 24%. Berikut rincian realisasi TA 2024 dan TA 2023 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dengan TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	4.257.362.825	3.009.055.092	141
Belanja Barang	5.267.823.667	4.868.347.770	108
Belanja Modal	95.468.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Pengembalian Belanja		(149.918.529)	
Jumlah	9.620.654.492	7.727.484.333	124

Kenaikan realisasi belanja TA 2024 dibandingkan TA 2023 disebabkan karena adanya peningkatan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.257.362.825,00 dan Rp 3.009.055.092,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami peningkatan 41 % dibanding tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan gaji pokok ASN sebesar 8 % sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga terdapat tambahan 3 orang pegawai mutasi dari unit kerja lain, pegawai PPPK sebanyak 2 orang serta adanya lembur di tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.847.796.700	2.115.942.720,00	135
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.006	28.948	138
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196.842.620	144.658.282,00	136
Belanja Tunj. Anak PNS	54.702.076	39.520.688	138
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	19.800.000	127
Belanja Tunj. Fungsional PNS	285.016.000	210.788.000	135
Belanja Tunj. PPh PNS	33.419.675	9.999.303	334
Belanja Tunj. Beras PNS	140.349.960	112.540.680	125
Belanja Uang Makan PNS	380.067.000	285.752.000	133
Belanja Tunjangan Umum PNS	73.635.000	70.395.000	105
Belanja Uang Lembur	93.510.000		-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)			-
Belanja Pembulatan Gaji PNS			-
Belanja Gaji Pokok PPPK	84.873.600	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.754	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.485.040	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	897.008	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.320.000	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	15.015.000	-	-
Belanja Uang Lembur PPPK	5.507.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	4.257.733.959	3.009.425.621	141
Pengembalian Belanja Pegawai	371.134	370.529,00	100
Jumlah Belanja	4.257.362.825	3.009.055.092	141

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.267.823.667,00 dan Rp4.868.347.770,00. Realisasi belanja barang TA 2024 sebesar 108% dari TA 2023. Adanya kenaikan realisasi sebesar 8% sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	1.536.182.264	942.494.940	163
Belanja Barang Non Operasional	893.875.200	929.418.600	96
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	230.711.500	220.450.000	105
Belanja Jasa	354.656.593	437.395.601	81
Belanja Pemeliharaan	669.720.997	587.473.343	114
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.442.677.113	1.570.663.286	92
Belanja Perjalanan Luar Negeri		-	-
Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	140.000.000	330.000.000	42
Jumlah Belanja Kotor	5.267.823.667	5.017.895.770	105
Pengembalian Belanja		149.548.000	-
Jumlah Belanja	5.267.823.667	4.868.347.770	108

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp95.460.000,00 dan 0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belum adanya realisasi belanja modal dikarenakan menunggu realisasi anggaran pendapatan karena belanja modal yang dikeluarkan berasal dari dana PNBK.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.468.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	95.468.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	95.468.000	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.332.300,00 dan Rp. 22.155.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: Barang Konsumsi berupa tinta, kertas, dan alat tulis kantor lainnya yang masuk dalam stok di gudang. Persediaan lainnya senilai Rp. 22.155.000,00 berupa pengadaan sapi dan barang konsumsi stock opname di Gudang.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	24.332.300,00	22.155.000,00
Jumlah	24.332.300,00	22.155.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp128.655.031,00 dan Rp128.655.031,00. Total luas tanah BPP Lampung seluas 94.478 m²

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.030.448.721,00 dan Rp 11.961.765.721,00. Berikut rincian peralatan dan mesin TA 2024

Tabel Rincian Kelompok Barang Peralatan dan Mesin

KDSATKER	JNSDOK1	TRN_BMN	RPHREAL
018.10.120040	406 JRNBMN	305 Koreksi Pencatatan	(2.200.000,)
018.10.120040	406 JRNBMN	101 Pembelian	95.468.000,
018.10.120040	406 JRNBMN	401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	(24.585.000,)
018.10.120040	406 JRNBMN	304 Reklasifikasi Keluar	(20.160.000,)
018.10.120040	406 JRNBMN	107 Reklasifikasi Masuk	20.160.000,
018.10.120040	999 SAWAL	999 Saldo Awal	11.961.765.721,
TOTAL			12.030.448.721,

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.356.416.000,00 dan Rp1.356.416.000,00.

C.2.5. Aset Tetap lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp74.700.000,00 dan Rp74.700.000,00 berupa bahan buku cetak perpustakaan.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-17.175.693.507,00 dan Rp-15.938.962.917,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 11.061.336.345,00	- 10.648.774.175,00	(412.562.170)	104
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 5.346.128.891,00	- 4.629.997.850,00	(716.131.041)	115
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	- 506.017.149,00	- 429.660.463,00	(76.356.686)	118
Beban Penyusutan Irigasi	- 229.175.497,00	- 201.492.764,00	(27.682.733)	114
Beban Penyusutan Jaringan	- 33.035.625,00	- 29.036.875,00	(3.998.750)	114
Jumlah Amortisasi			-	-
Jumlah	(17.175.693.507)	(15.938.962.127)	(1.236.731.380)	108

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 284.199.450,00 dan Rp 259.614.450,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 Desember 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		28,	259.614.450,	4,	24.585.000,	0,	0,	32,	284.199.450,
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1,	139.800.000,	0,	0,	0,	0,	1,	139.800.000,
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	0,	0,	3,	16.720.000,	0,	0,	3,	16.720.000,
30303	ALAT UKUR	-	3,	36.300.000,	0,	0,	0,	0,	3,	36.300.000,
30501	ALAT KANTOR	-	4,	46.955.000,	0,	0,	0,	0,	4,	46.955.000,
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	16,	11.016.000,	0,	0,	0,	0,	16,	11.016.000,
31001	KOMPUTER UNIT	-	1,	13.750.000,	1,	7.865.000,	0,	0,	2,	21.615.000,
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	3,	11.793.450,	0,	0,	0,	0,	3,	11.793.450,

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pelatihan Pertanian Lampung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. - 284.199.450,00 dan Rp - 259.614.450,00. Adanya penambahan aset dari peralatan mesin yang tergolong rusak berat. Akumulasi penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.15.795.417,00 dan Rp. 35.211.545,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan Pertanian Lampung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.3
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	16.309.000
Belanja barang yang masih harus dibayar	15.795.177	18.902.545
	-	-
Jumlah	15.795.177	35.211.545

Munculnya utang pihak ketiga ini pada Desember 2024 dikarenakan adanya jurnal manual pembayaran Listrik dan telepon Bulan Desember dibebankan di Bulan Januari 2025 sehingga secara pada LRA sudah tercatat sedangkan pada LO belum tercatat di 2024 dan menjadi utang pihak ketiga

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 150.054.046.292,00 dan Rp 151.059.860.049,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 75.654.100,00 dan Rp. 232.107.129,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	26.862.500	1.800.000	1.492
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.360.100	31.231.700	43
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	113.590.000	45.885.000	248
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	847.000		-
Pendapatan Sewa dan Peralatan Mesin	5.832.000		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		2.590.429	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	500.000	108.000.000	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		42.600.000	-
Jumlah	160.991.600	232.107.129	69

Tidak ada perbedaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) antara LO dan LRA.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.4.241.053.825,00 dan Rp.3.836.858.942,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.847.796.700	2.666.521.620	181.275.080	107
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.006	36.120	3.886	111
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	- 1.134	(529)	(605)	214
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	196.842.620	182.565.412	14.277.208	108
Beban Tunj. Anak PNS	54.702.076	50.254.280	4.447.796	109
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-	100
Beban Tunj. Fungsional PNS	285.016.000	268.610.000	16.406.000	106
Beban Tunj. PPh PNS	33.419.675	12.027.019	21.392.656	278
Beban Tunj. Beras PNS	140.349.960	142.305.300	(1.955.340)	99
Beban Uang Makan PNS	364.550.000	368.913.000	(4.363.000)	99
Beban Tunjangan Umum PNS	73.635.000	86.370.000	(12.735.000)	85
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	- 370.000	(370.000)	-	100
Beban Gaji Pokok PPPK	84.873.600	22.454.800	62.418.800	378
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.754	280	1.474	626
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.485.040	1.186.600	3.298.440	378
Beban Tunjangan Anak PPPK	897.008	237.320	659.688	378
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12.320.000	3.520.000	8.800.000	350
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.055.520	1.158.720	2.896.800	350
Beban Uang Makan PPPK	14.223.000	5.869.000	8.354.000	242
Belanja Uang Lembur	93.510.000	-	93.510.000	-
Belanja Uang Lembur PPK	5.507.000	-	5.507.000	-
Jumlah	4.241.053.825	3.836.858.942	404.194.883	111

Terdapat perbedaan nilai antara beban pegawai di Laporan Operasional dengan belanja pegawai di Realisasi Anggaran Semester II TA 2024 sebesar Rp16.309.000,00. Adapun rincian nya sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Selisih LO basis akrual dengan LRA basis kas

URAIAN JENIS BEBAN	Akrual (LO)	Kas (LRA)	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.847.796.700	2.847.796.700	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196.842.620	196.842.620	-
Belanja Tunj. Anak PNS	54.702.076	54.702.076	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	285.016.000	285.016.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	33.419.675	33.419.675	-
Belanja Tunj. Beras PNS	140.349.960	140.349.960	-
Belanja Uang Makan PNS	364.550.000	380.067.000	(15.517.000)
Belanja Tunjangan Umum PNS	73.635.000	73.635.000	-
Belanja Uang Lembur	93.510.000	93.510.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.006	40.006	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	84.873.600	84.873.600	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.754	1.754	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.485.040	4.485.040	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	897.008	897.008	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.320.000	12.320.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520	4.055.520	-
Belanja Uang Makan PPPK	14.223.000	15.015.000	(792.000)
Belanja Lembur PPPK	5.507.000	5.507.000	-
Jumlah Belanja kotor	4.241.424.959	4.257.733.959	(16.309.000)
Pengembalian Belanja Pegawai	(371.134)	(371.134)	-
Jumlah Belanja	4.241.053.825	4.257.362.825	(16.309.000)

Selisih sebesar Rp16.309.000,00 merupakan Beban yang masih harus dibayar di TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Hutang Pihak ketiga TA. 2024, sbb :	- 16.309.000,00
- Uang Makan Desember 2023	- 16.309.000,00

Utang pihak ketiga berupa uang makan Desember tahun 2023 akan menambah realisasi anggaran pada belanja pegawai tahun 2024 dikarenakan sebelumnya pembayaran menggunakan anggaran tahun 2024, setelah dilakukan jurnal balik maka anggaran tersebut kembali ke tahun 2024 secara akrual.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 114.597.100,00 dan Rp. 218.122.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Persediaan konsumsi	228.534.200	245.450.000	(16.915.800)	(6,89)
			-	-
Jumlah Beban Persediaan	228.534.200,00	245.450.000	(16.915.800)	(6,89)

Terdapat perbedaan nilai antara beban persediaan di Laporan Operasional dengan belanja barang persediaan pada realisasi anggaran sebesar Rp. 2.177.300,00 dan merupakan barang konsumsi habis pakai (521811) yang masih ada di gudang.

Perbandingan LRA vs LO terhadap beban persediaan konsumsi

Uraian	Kas (LO)	Akrual (LRA)	Selisih
Beban Persediaan Konsumsi	228.534.200,00	230.711.500,00	- 2.177.300,00

Perbedaan basis pencatatan, dimana LRA pencatatan menggunakan basis kas sedangkan LRO menggunakan basis akrual.

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.781.606.689,00 dan Rp. 3.026.801.937,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	Naik (turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.447.014.264	1.200.624.940,00	246.389.324,00	21
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.960.000	1.640.000,00		
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.208.000	107.400.000,00	- 20.192.000,00	(19)
Beban Bahan	835.025.200	1.153.868.600,00	- 318.843.400,00	(28)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.450.000,	15.860.000,	4.590.000,00	29
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	24.000.000,	0,		
Beban Langganan Listrik	216.181.820,	247.205.078,00	- 31.023.258,00	(13)
Beban Langganan Telepon	1.267.405,	1.624.319,00	- 356.914,00	(22)
Beban Sewa	69.000.000,	122.750.000,00	- 53.750.000,00	(44)
Beban Jasa Profesi	65.100.000,	206.659.000,00	- 141.559.000,00	(68)
Beban Honor Output Kegiatan	14.400.000,	2.700.000,00	11.700.000,00	433
Pengembalian Beban Bahan		28.530.000,00	28.530.000,00	(100)
Pengembalian Beban Jasa Profesi		5.000.000,00	5.000.000,00	(100)
Jumlah	2.781.606.689,00	3.026.801.937,00	- 245.195.248,00	(8)

Realisasi beban barang dan jasa sampai dengan September Tahun 2024 mengalami penurunan 8%.

Perbandingan Beban Barang dan Jasa LRA dengan LO semester II Tahun 2024

Uraian	Akrual (LO)	Kas (LRA)	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	1.447.014.264,00	1.447.014.264,00	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.208.000,00	87.208.000,00	-
Beban Bahan	835.025.200,00	835.025.200,00	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	20.450.000,00	20.450.000,00	-
Beban Langganan Listrik	216.181.820,00	219.289.088,00	- 3.107.268,00
Beban Langganan Telepon	1.267.405,00	1.267.505,00	- 100,00
Beban Sewa	69.000.000,00	69.000.000,00	-
Beban Jasa Profesi	65.100.000,00	65.100.000,00	-
Beban Honor Output Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.960.000,00	1.960.000,00	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	24.000.000,00	24.000.000,00	-
JUMLAH	2.781.606.689,00	2.784.714.057,00	- 3.107.368,00

Adanya selisih LRA dan LO untuk beban barang dan jasa sebesar Rp3.107.368,00 yang terdiri dari akun 522111 belanja listrik sebesar Rp3.107.268,00. Hal ini merupakan pengurangan dari pembayaran Listrik Desember 2024 di Bulan Januari 2025 sebesar Rp15.703.935,00 dikurangi dengan biaya Listrik Bulan Desember 2023 sebesar Rp18.811.203,00. Secara akrual pembayaran Listrik Tahun 2024 sesuai dengan tagihan yang ada namun secara kas perhitungan sesuai dengan basis SP2D. Selain itu adanya akun 522112 berupa pembayaran tagihan telepon juga terdapat selisih Rp.100,- dengan penjelasan sama seperti tagihan Listrik.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 478.227.094,00 dan Rp. 559.775.343,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak ada perbedaan beban pemeliharaan antara LRA dan LO. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	369.742.500	408.143.600	(38.401.100)	91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.671.497	213.880.691	51.790.806	124
Beban Pemeliharaan Jaringan	34.307.000	71.350.000	(37.043.000)	48
Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin		(19.253.000)	19.253.000	-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		(8.445.000)	8.445.000	-
Jumlah	669.720.997	665.676.291	4.044.706	101

Perbandingan Beban Pemeliharaan secara LO dan Akrual SEMESTER II Tahun 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Akrual (LO)	Kas (LRA)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	369.742.500	369.742.500	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.671.497	265.671.497	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	34.307.000	34.307.000	-
Pengembalian Beban Peralatan dan Mesin			-
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			-
Jumlah	669.720.997	669.720.997	-

Tidak terdapat selisih beban pemeliharaan secara akrual maupun kas

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.442.677.113,00 dan Rp1.896.900.564,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	861.111.613,00	878.493.016	(17.381.403)	98
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	581.565.500,00	435.992.548	145.572.952	133
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		670.735.000	(670.735.000)	-
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		(16.520.000)	16.520.000	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting		(71.800.000)	71.800.000	-
			-	-
Jumlah	1.442.677.113,00	1.896.900.564	(454.223.451)	76

Realisasi beban perjalanan dinas sampai dengan Desember 2024 sebesar 76% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya..

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas antara LO yang dicatat secara akrual dan LRA yang dicatat basis kas

URAIAN JENIS BEBAN	Akrual (LO)	Kas (LRA)	Selisih
Beban Perjalanan Dinas Biasa	861.111.613	861.111.613	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	581.565.500	581.565.500	-
Jumlah	1.442.677.113	1.442.677.113	-

Tidak ada perbedaan antara pencatatan secara akrual maupun kas terhadap beban perjalanan dinas

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 140.000.000,00 dan Rp. 330.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	140.000.000,00	330.000.000,00	54
Jumlah	140.000.000,00	330.000.000,00	54

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.061.336.345,00 dan Rp10.648.774.175,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 11.061.336.345,00	- 10.648.774.175,00	(412.562.170)	104
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 5.346.128.891,00	- 4.629.997.850,00	(716.131.041)	115
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	- 506.017.149,00	- 429.660.463,00	(76.356.686)	118
Beban Penyusutan Irigasi	- 229.175.497,00	- 201.492.764,00	(27.682.733)	114
Beban Penyusutan Jaringan	- 33.035.625,00	- 29.036.875,00	(3.998.750)	114
Jumlah Amortisasi			-	-
Jumlah	(17.175.693.507)	(15.938.962.127)	(1.236.731.380)	108

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	42.600.000,00	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.590.429,00	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	557.500,00	-	-
Jumlah	557.500,00	45.190.429,00	-

Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu merupakan selisih pendapatan antara LRA dan LO. Pada tahun 2024 terdapat pendapatan penyesuaian nilai persediaan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 151.059.860.049,00 dan Rp 152.268.402.239,00

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 10.606.117.604,00 dan Rp. 10.987.653.392,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, beban penyusutan dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.459.662.892,00 dan Rp9.779.111.402,00. Data ditagihkan ke entitas lain berupa penjumlahan dari belanja pegawai dan belanja barang. Diterima dsari entitas lain berupa data perolehan PNPB. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 saldo DDEL adalah sebesar Rp-0,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 149.913.405.337,00 dan Rp 151.059.860.049,00

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan catatan hasil reviu Inspektorat Jenderal terkait ketidaksesuaian beban persediaan pada laporan operasional belum sama dengan transaksi pemakaian persediaan habis pakai pada aplikasi Monsakti seluruhnya senilai Rp. 1.091.300,00. Data tersebut merupakan transaksi cash opname dari operator persediaan. Berikut terlampir data dari cash opname.

Tabel. Status Transaksi Beban Persediaan Hasil Opname Fisik

Jenis Transaksi	Kode Akun	Nama Akun	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Tanggal Buku
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Pena (Kotak)	-1	-26.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Tinta Epson Hitam	-1	-120.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Map odner besar	-1	-44.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Binder Klip Sedang	-1	-13.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Amplop Polos	-1	-30.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	lakban kertas 1 inch	-1	-15.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Map Biola	1	120.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Tinta blueprint hitam	-1	-55.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Kertas Sidu A4 75 grm	-1	-250.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	KERTAS SIDU F4 75 GRM	-1	-280.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Stiky Notes	-1	-15.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Tinta Blueprint Warna	-2	-286.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Wipol (AT)	-1	-21.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Sapu lidi (AT)	-1	-25.300	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Sunlight (AT)	-1	-10.000	28/06/2024
Hasil Opname Fisik	117111	Barang Konsumsi	Handsoap botol kecil	-1	-21.000	28/06/2024

LAMPIRAN SEMESTER II 2024

1. Neraca Face
2. Neraca Percobaan Akrua
3. Neraca Percobaan Kas
4. Neraca BMN
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Laporan Realisasi Anggaran
8. LPJ Penerimaan
9. Hasil Pemeriksaan Kas
10. Mutasi Rekening
11. Memo Penyesuaian
12. DIPA awal dan akhir
13. RKKL 2024
14. SHR
15. CHR